

Kode/Rumpun Ilmu: 562/AKUNTANSI

**LAPORAN KEMAJUAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN  
PADA PERUSAHAAN LISTING DI PASAR MODAL  
PASCA *MANDATORY DISCLOSURE POLICY* PP47/2012  
DAN USULAN KEBIJAKAN PENDUKUNG**

Tahun ke -2 dari rencana 3 tahun

**Dr. Rizal Yaya SE., M.Sc. Ak., CA. NIDN: 0518127301 (Ketua)**  
**Sigit Arie Wibowo SE., M.Acc. Ak., CA NIDN: 0506098601 (Anggota)**

**DIBIYAI DENGAN  
DIPA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
NOMOR : DIPA-042.06-0.1.401516/2016 TERTANGGAL 7 DESEMBER 2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**Agustus, 2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan pada Perusahaan Listing di Pasar Modal PascaMandatory Disclosure Policy PP47/2012 dan Usulan Kebijakan Pendukung

**Peneliti/Pelaksana**

**Nama Lengkap** : RIZAL YAYA Ph.D.  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
**NIDN** : 0518127301  
**Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Nomor HP** : 089636751005  
**Alamat surel (e-mail)** : rizalyaya@gmail.com

**Anggota (1)**

**Nama Lengkap** : SIGIT ARIE WIBOWO  
**NIDN** : 0506098601  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
**Institusi Mitra (jika ada)** :  
**Nama Institusi Mitra** :  
**Alamat** : -  
**Penanggung Jawab** : -  
**Tahun Pelaksanaan** : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp 50.000.000,00  
**Biaya Keseluruhan** : Rp 177.827.500,00

Mengetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi UMY



(DR. NANO PRAWOTO M.Si.)  
NIP/NIK 19650604199202143016

Yogyakarta, 9 - 9 - 2016  
Ketua,



(RIZAL YAYA Ph.D.)  
NIP/NIK 19731218199904143068

## RINGKASAN

Ditandatangani Protokol Kyoto oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2004 sebagai upaya pengurangan emisi karbon di dunia telah diikuti dengan revisi pada UU Perseroan Terbatas di tahun 2007. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan PP no 47 th 2012 yang mewajibkan perusahaan yang berbadan hukum PT yang berkaitan dengan sumberdaya alam untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan di laporan tahunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *mandatory disclosure policy* tersebut terhadap praktik pengungkapan tanggungjawab lingkungan perusahaan yang listing di pasar modal. Disamping itu, penelitian ini juga berusaha merumuskan kebijakan pendukung yang relevan agar pengungkapan perusahaan semakin berkualitas dan tanggung jawab lingkungan perusahaan semakin ditunaikan dengan baik.

Pada tahun pertama telah dilakukan study data sekunder terhadap 249 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari semua jenis industri kecuali sektor perdagangan dan keuangan. Dengan membandingkan praktik pengungkapan lingkungan satu tahun sebelum dan satu tahun setelah kebijakan *mandatory* dikeluarkan, ditemukan peningkatan yang signifikan dalam hal index GRI yang dilaporkan, jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan masalah lingkungan, index karbon emisi yang dilaporkan dan jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan aspek emisi karbon. Berdasarkan analisis detail, ditemukan peningkatan yang signifikan pada perusahaan dengan karbon emisi yang sedang dan yang rendah. Studi ini mendukung teori legitimasi Suchman (1995) bahwa legitimasi mesti memperhatikan kelompok sosial dalam dinamika legitimasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan praktik pengungkapan lingkungan, pemerintah perlu menspesifikkan informasi yang perlu diungkap.

Pada tahun kedua, sudah dilakukan survei kuesioner kepada 302 perusahaan yang listing di pasar modal terkait praktik manajemen dan pelaporan lingkungan mereka.

Kata Kunci : *Teori Legitimasi, Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, Mandatory Disclosure Policy, PP 47/2012*

## **PRAKATA**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas izinnya penelitian tahun kedua ini bisa diselesaikan. Berbagai kesulitan yang dialami selama melakukan penelitian alhamdulillah bisa diatasi dan penelitian ini akhirnya bisa dituliskan dalam sebuah laporan akhir tahun kedua. Hasil penelitian ini juga sudah dipublikasikan dalam forum ilmiah Asia Pacific Conference on Accounting and Finance di Bali yang diselenggarakan secara bersama oleh Universitas Brawijaya dan Universitas Udayana pada tanggal 11-12 Juni 2015 di Denpasar, Bali. Pada saat yang sama, hasil penelitian ini sudah dikirim ke jurnal internasional, Social Responsibility Journal untuk keperluan publikasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	3
A. Permasalahan lingkungan dan kepentingan Negara .....	3
B. Kebijakan pengungkapan lingkungan bagi perusahaan .....	5
C. Teori-teori yang mendasari pengungkapan lingkungan .....	7
D. Pendekatan-pendekatan dalam pelaporan pengungkapan lingkungan .....	10
E. Penelitian terdahulu di Indonesia dan konteks penelitian .....	11
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	13
A. Tujuan Penelitian .....	13
B. Masalah dan Urgensi Penelitian .....	13
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	15
A. Populasi dan Sampel .....	15
B. Variabel Penelitian .....	15
C. Metode Analisis .....	16
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
A. Gambaran Populasi dan Sampel .....	19
B. Pengaruh kebijakan mandatory disclosure .....	21
C. Karakteristik industri yang mengalami peningkatan pengungkapan lingkungan	23
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....	28
A. Rencana Penelitian Tahun Kedua .....	28
B. Rencana Penelitian Tahun Ketiga .....	28
C. Ringkasan Peta Jalan Penelitian .....	29
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN .....	31
A. Kesimpulan .....	31
B. Orisinalitas, batasan dan saran untuk peneliti selanjutnya .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	33
Lampiran .....	36
Lampiran 1: Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya .....	36
Lampiran 2: Luaran Penelitian – Publikasi .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Target Penurunan Gas Rumah Kaca berdasarkan Perpres 61/2011	4
Tabel 4.1: Variabel-variabel yang digunakan sebagai indikator	16
Tabel 5.1: Jumlah perusahaan terdaftar di BEI tahun 2011-2013 beserta yang publikasi Laporan Tahunan/Laporan berkelanjutan	19
Tabel 5.2: Jumlah Populasi berdasarkan Sektor industri	19
Tabel 5.3: Jumlah Sampel berdasarkan Sektor industri	20
Tabel 5.4: Jumlah Sampel berdasarkan Kategori Emisi Perusahaan	20
Tabel 5.5: Jumlah Sampel berdasarkan Jenis Kepemilikan	21
Tabel 5.6: Persentase perusahaan yang mengungkapkan GRI dari 2011 sd 2013	21
Tabel 5.7: Persentase perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon (EK) dari	22
Tabel 5.8: Perusahaan yang mempublikasikan laporan berkelanjutan dari 2011 s/d 2013	23
Tabel 5.9: Mean pengungkapan lingkungan 2011 – 2013 berdasarkan tipe kepemilikan	24
Tabel 5.10: Mean pengungkapan lingkungan 2011 – 2013 berdasarkan karakteristik emisi karbon	25
Tabel 5.11: Uji paired sampel t-test untuk tingkat pengungkapan lingkungan 2011-2012 dan 2011-2013	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Klasifikasi Emisi Karbon berdasarkan sektor industri	18
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya	36
Lampiran 2: Luaran Penelitian - publikasi	38

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Sebuah lembaga internasional, International Panel on Climate Change (IPCC, 2013) menyatakan bahwa perubahan iklim terus berlangsung di sekeliling bumi dan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia. Hal ini bisa dilihat dari perubahan yang terjadi di lapisan atmosfer, cryosfir, tanah dan laut. Dilaporkan oleh IPCC bahwa konsentrasi atmosfer untuk gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metan (CH<sub>4</sub>) dan nitrus oksida (N<sub>2</sub>O) telah meningkat dalam beberapa abad ini sejak zaman industri tahun 1750 dan berlanjut seiring dengan perkembangan bisnis dan industri. Menurut Whitmarsh (2005) peningkatan ini telah mengurangi kemampuan bumi untuk mempertahankan temperatur yang stabil.

Merespon masalah ini, sejumlah aksi telah dilakukan oleh negara-negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dunia untuk mengajak perusahaan-perusahaan untuk mengurangi emisi karbon. Prinkse and Kolk (2009) mencatat bahwa Protokol Kyoto dan Skema Perdagangan Emisi Karbon Uni Eropa merupakan dua aksi yang penting untuk mengurangi emisi karbon di dunia. Setelah Protokol Kyoto dirumuskan, banyak Negara kemudian meratifikasinya dan menerapkan berbagai kebijakan terkait lingkungan hidup sebagai tindak lanjut. Kebijakan negara terkait pengurangan emisi karbon meliputi kebijakan dalam hal penggunaan sumber daya alam dan pelaporan tentang apa yang telah dicapai oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang terkena aturan, kebijakan yang dibuat bisa diklasifikasikan dalam kategori sukarela atau wajib.

Sebelum menandatangani Protokol Kyoto di tahun 2004, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang terbatas untuk mengurangi pemansan global dan berfokus pada sektor minyak dan gas. Setelah menandatangani protokol tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Perseroan Terbatas yang baru (UU no 40 th 2007) yang mengharuskan perusahaan yang beroperasi di area yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang ini kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no 05/MBU/2007 tentang Kemitraan dalam Pengembangan Lingkungan Hidup. Kemudian di tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan operasional pertama yang mewajibkan perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan tanggungjawab

sosial dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan tersebut juga mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka di laporan tahunan perusahaan. Dengan memiliki peraturan ini, diharapkan agar peran perusahaan di Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan akan meningkat dan kualitas pelaporan sosial dan lingkungan akan membaik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh PP 47 th 2012 yang bersifat wajib bagi perusahaan terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Walau peraturan ini baru diterapkan di tahun 2012, pengaruh awal dari peraturan ini sangat relevan untuk diteliti.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Permasalahan lingkungan dan kepentingan Negara**

Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (HPLI) (2014) menyebutkan bahwa terdapat beragam masalah lingkungan dalam kehidupan ini. Masalah itu bisa bersifat lokal, nasional maupun global. Masalah lingkungan bersifat lokal antara lain kekeringan, banjir dan longsor, erosi pantai dan intrusi air laut. Adapun di tingkat nasional, masalah lingkungan adalah berupa pencemaran hutan dan pencemaran minyak lepas pantai dan di tingkat global, masalah lingkungan yang sering diangkat di berbagai Negara antara lain pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, dan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun.

Persoalan mendasar terjadinya masalah lingkungan adalah meningkatnya carbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Metan (CH<sub>4</sub>), Nitrous Oksida (N<sub>2</sub>O), Hydrofluorocarbon (HFCs), Perfluorocarbon (PFCs), Sulphur heksafluorida (SF<sub>6</sub>) atau disebut dengan Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Gas ini dalam Protokol Kyoto (1997) diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya efek pemanasan global. Diperkirakan diantara tahun 1990-2100 akan terjadi kenaikan rata-rata suhu global sekitar 1,4 sampai 5,8 derajat celsius. Akibatnya akan terjadi kenaikan rata-rata permukaan air laut disebabkan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Banyak kawasan di dunia akan terendam air laut dan terjadi perubahan iklim global dimana hujan dan banjir akan meningkat, wabah beberapa penyakit meningkat serta produksi tumbuhan pangan terganggu. Kesemua hal tersebut berakibat pada kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Atas dasar itu pula, dalam negara-negara di dunia termasuk Indonesia meratifikasi Protocol Kyoto yang dirumuskan tahun 1997 di Jepang. Dalam kesepakatan tersebut, dinyatakan bahwa Negara-negara peserta secara bersama-sama mengurangi emisi GRK hingga 5,2% dibawah tingkat emisi tahun 1990 untuk dicapai pada tahun 2012.

Peran strategis mengatasi masalah lingkungan telah masuk dalam agenda pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang diundangkan dalam UU no 17/2007 yang dalam penjelasannya disebutkan:

... dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Secara khusus, pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Agar program ini berjalan efektif, di daerah juga dikembangkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Sekretariat Kabinet (2012) berharap agar RAN-GRK dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi.

Perpres ini secara detail menjabarkan target penurunan emisi GRK ke dalam lima bidang utama (Tabel 2.1), yaitu: (i) pertanian; (ii) kehutanan dan lahan gambut; (iii) energi dan transportasi; (iv) industri, serta (v) pengelolaan limbah dengan target penurunan sebagai berikut:

Tabel 2.1: Target Penurunan Gas Rumah Kaca berdasarkan Perpres 61/2011

Bidang	Target Penurunan (Gton CO <sub>2</sub> e) 26%	Target Penurunan (Gton CO <sub>2</sub> e) 41%
Kehutanan dan Lahan Gambut	0.672	1.039
Pertanian	0.008	0.011
Energi dan transportasi	0.036	0.056
Industri	0.001	0.005
Limbah	0.048	0.078
Total	0.767	1.189

Pada setiap bidang, pemerintah merumuskan kebijakan umum dan strategi yang akan digunakan yang diharapkan secara langsung dapat menurunkan emisi karbon di Indonesia. Dalam RAN-GRK kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan inti yang dalam hal ini perusahaan banyak ikut serta dalam bidang energi dan transportasi serta bidang industry. Di bidang energi dan transportasi misalnya terdapat kegiatan Penerapan Mandatori Manajemen Energi untuk Pengguna Padat Energi. Dalam kegiatan ini, ditargetkan sebanyak 200 perusahaan ikut serta dalam penerapan manajemen energi pada periode 2010-2014 untuk menurunkan emisi karbon sebesar 2,24 juta ton. Selanjutnya ditargetkan 200 perusahaan lagi ikut serta pada periode 2015-2020 untuk menghasilkan penurunan emisi karbon sebesar 7,92 juta ton.

## **E. Penelitian terdahulu di Indonesia dan konteks penelitian**

Pengungkapan lingkungan di Indonesia telah diteliti dalam beragam perspektif oleh banya peneliti. Mirfazli (2008) meneliti bagaimana perusahaan high profile dan low profile berbeda dalam hal pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Berdasarkan konten analisis pada pengungkapan CSR di tahun 2004 oleh 16 perusahaan yang terdaftar di BEI (dahulu BEJ), dia menemukan ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok perusahaan tersebut dalam hal pengungkapan CSR. Hidayati (2011) menemukan bahwa industri yang berbeda memiliki pola yang berbeda dalam melaksanakan program CSR. Dia mengatakan, perusahaan dalam industri barang konsumen cenderung melakukan program CSR yang dalam bidang yang terkait maupun tidak terkait dengan bisnis perusahaan, tapi pada industri tambang cenderung melakukan program yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan.

Pengungkapan lingkungan di Indonesia pada umumnya pada saat kebijakan pemerintah bersifat sukarela. Djajadikerta dan Trireksani (2012) mengatakan bahwa praktik pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia baru pada tahap awal. Mereka mengungkapkan bahwa kebanyakan perusahaan masih kurang paham tentang pengungkapan sosial dan lingkungan. Adapun alasan utama pengungkapan adalah untuk mendapatkan pengakuan kecukupan perilaku sosial perusahaan. Investigasi Siregar dan Bachtiar (2010) tentang pengaruh pelaporan CSR pada kinerja perusahaan, ditunjukkan bahwa ada sedikit bukti pengaruh positif CSR terhadap kinerja dimasa depan. Dengan demikian, adanya perubahan konteks peraturan berupa dikeluarkannya PP 47 tahun 2012 yang bersifat wajib, terdapat kemungkinan meningkatnya praktik pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan yang memerlukan bukti empiris dari penelitian untuk dapat menjawabnya. Pertanyaan tersebut antara lain: (1) Apakah pengaruh kebijakan mandatory disclosure tersebut signifikan?; (2) Jenis industri apa saja yang mengalami peningkatan?; (3) Aspek pengungkapan apa saja yang meningkat?; (4) Apa yang menyebabkan suatu perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapannya dan apa yang membuat suatu perusahaan tidak mengalami peningkatan?; (5) Serta kebijakan pendukung apa yang relevan dikembangkan untuk agar kualitas pengungkapan bisa semakin baik?

## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan data dan bukti empiris tentang pengaruh keluarnya PP no 47 th 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan.
2. Menggali alasan patuh dan tidak patuhnya perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan.
3. Merumuskan kebijakan pendukung yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan dengan berbasiskan pada bukti empiris yang diperoleh

#### **B. Manfaat Penelitian**

Upaya pelestarian lingkungan merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah sejak diratifikasinya Protokol Kyoto. Dalam KTT Negara G-20 di Pittsburgh 5 September 2009, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyampaikan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business As Usual/BAU) dan 41% pada tahun 2020 jika mendapatkan dukungan internasional. Berdasarkan data Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia disebutkan bahwa emisi karbon Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 2.100 MtCO<sub>2</sub>e dan cenderung meningkat menjadi 3.300 MtCO<sub>2</sub>e pada tahun 2030. Secara yuridis, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK tersebut dituangkan dalam Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Penurunan Emisi Rumah Kaca (RAN-GRK).

Upaya pencapaian target penurunan emisi GRK sangat terkait dengan peran serta sektor swasta melaksanakan tanggung jawab lingkungannya. Dalam banyak kasus, pembakaran hutan untuk perluasan lahan yang berperan besar meningkatkan emisi GRK, ternyata dilakukan oleh perusahaan swasta. Oleh karena itu, melalui PP no 47/2012, disamping mewajibkan perusahaan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah juga mewajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan perusahaan di laporan tahunan perusahaan.

Dalam rilis yang disampaikan ke media masa (Bisnis.com, 2012), Sekretariat

Kabinet menjelaskan bahwa PP baru itu bertujuan ‘mendorong meningkatkan kesadaran perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan’. Disamping itu juga dilaporkan bahwa PP tersebut dibuat untuk menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Komentar optimis terhadap adanya peraturan ini disampaikan oleh Profesor Andreas Lako (2013) yang juga pengurus Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Pendidik Seksi Corporate Governance & CSR dalam Simposium Nasional Akuntansi XVI di Manado. Dikatakan olehnya bahwa peraturan ini membawa konsekuensi serius pada pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan akuntansi. Akan tetapi sebaliknya, Dr. Miko Kamal (2012) seorang advokat dan staf pengajar magister hukum menyatakan bahwa peraturan ini justru menyebabkan CSR tidak lagi wajib dan bisa menjadi dalih pengusaha untuk tidak melaksanakan CSR. Padangan ini didasarkan karena tidak adanya kalimat di dalam peraturan tersebut yang memerintahkan perseroan untuk memasukkan dana CSR dalam anggaran biaya perseroan. Menurut Kamal, PP ini justru dipandang sebagai langkah mundur dalam mewajibkan CSR karena memberikan sepenuhnya otonomi penganggaran kepada internal perseroan.

Untuk itu, adanya studi yang secara khusus meneliti pengaruh kebijakan *mandatory disclosure* ini, diharapkan dapat memberikan bukti tentang pengaruh kebijakan tersebut. Adanya kesimpulan yang didasarkan pada fakta lapangan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berkualitas untuk pengembangan kebijakan pemerintah selanjutnya.

## **BAB 4 METODE PENELITIAN**

Ada tiga tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini. Pertama, untuk mendapatkan data dan bukti empiris tentang pengaruh keluarnya PP no 47 th 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Kedua, untuk menggali alasan patuh dan tidak patuhnya perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Ketiga, merumuskan kebijakan pendukung yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan dengan berbasiskan pada bukti empiris yang diperoleh. Tujuan penelitian pertama dijawab pada tahun pertama penelitian, adapun tujuan kedua dan ketiga dijawab pada tahun kedua dan ketiga penelitian.

Tujuan penelitian pertama untuk mendapatkan data dan bukti empiris tentang pengaruh keluarnya PP no 47 th 2012 terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan direncanakan akan dicapai pada tahun pertama penelitian. Pada tahap ini ada tiga pertanyaan penelitian yang akan dijawab yaitu (1) Apakah pengaruh kebijakan mandatory disclosure tersebut signifikan?; (2) Jenis industri apa saja yang mengalami peningkatan pengungkapan lingkungan?; (3) Aspek pengungkapan apa saja yang meningkat?. Penelitian pada tahun pertama dilakukan dengan analisis terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan di laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik.

### **A Populasi dan sampel**

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah:

- (1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
- (2) Masuk dalam kategori sektor non-keuangan dan non-jasa antara lain pertanian, tambang, industri dasar, industri aneka ragam; bahan konsumen. Properti, real estate dan konstruksi bangunan; dan infrastruktur, utilities dan transportasi;
- (3) Mempublikasikan laporan tahunan di tahun 2011, 2012 dan 2013.

### **B Variabel penelitian**

Pengungkapan informasi dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua klasifikasi pelaporan: Global Reporting Initiative (GRI) dan Emisi Karbon yang masih merupakan bagian

dari indeks lingkungan GRI, tetapi lebih spesifik tentang emisi karbon (EN16, EN 17, EN 18, EN 19 and EN 20). GRI digunakan untuk mencakup elemen-elemen di semua aspek lingkungan, sementara itu Emisi Karbon digunakan karena isu emisi karbon telah menjadi agenda prioritas pemerintah setelah penandatanganan Protokol Kyoto 2004.

Adapun variabel-variabel berikut yang diteliti meliputi: (1) Persentase jumlah indeks yang dicakup oleh laporan terhadap total jumlah indeks dalam pelaporan GRI; (2) jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan informasi lingkungan berdasarkan masing-masing metode pengungkapan; dan (3) persentase jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan aspek lingkungan terhadap total kata didalam laporan; (4) Persentase indeks terkait emisi karbon (Carbon Emission) terhadap indeks yang dicakup dalam laporan terhadap total jumlah indeks emisi karbon; dan (5) Jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan informasi lingkungan berdasarkan Emisi carbon. Tabel 4.1 menyajikan ringkasan variabel-variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pengungkapan informasi lingkungan perusahaan.

**Tabel 4.1: Variabel-variabel yang digunakan sebagai indikator tingkat pengungkapan informasi lingkungan**

<b>Variabel</b>	<b>Pengukuran</b>
% Indeks GRI	Persentase jumlah indeks yang dicakup oleh laporan terhadap total jumlah indeks dalam pelaporan GRI
Jumlah kata GRI	Jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan informasi lingkungan berdasarkan GRI
Persentase GRI terhadap total pengungkapan	Persentase kata yang digunakan untuk melaporkan informasi lingkungan berdasarkan GRI terhadap total jumlah kata dalam laporan perusahaan.
% indeks Emisi Karbon	Persentase indeks terkait emisi karbon terhadap indeks yang dicakup dalam laporan terhadap total jumlah indeks emisi karbon
Jumlah kata Emisi Karbon	Jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan informasi lingkungan berdasarkan Emisi carbon.

### C. Metode Analisis

Variabel-variabel indikator pengungkapan dianalisis dengan menggunakan paired sampel t-test untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pengungkapan lingkungan perusahaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya PP no 47 th 2012. Semua variabel dihipotesiskan bahwa terdapat perbedaan yang significant bahwa lebih banyak informasi yang diungkapkan setelah dikeluarkannya kebijakan yang mewajibkan pengungkapan lingkungan tersebut. Analisis tambahan dilakukan untuk melihat pada kelompok perusahaan mana PP no 47 th

2012 berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan. Hal ini didasarkan pada studi sebelumnya bahwa tipe kepemilikan (milik pemerintah atau swasta) dan tipe industri mempengaruhi secara signifikan tingkat pengungkapan informasi lingkungan perusahaan.

Analisis tambahan dilakukan untuk melihat pada tipe perusahaan apa peraturan berjalan baik dalam membuat peningkatan pada pengungkapan lingkungan. Ini didasarkan pada studi terdahulu yang menemukan bahwa tipe kepemilikan (swasta atau pemerintah) (Zheng et al, 2014) dan tipe industri yang memiliki tingkat yang berbeda dalam kebijakan pengungkapan wajib (Choi et al, 2013).

## BAB 5

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Populasi dan Sampel

Berdasarkan basis data dan hasil verifikasi peneliti terhadap jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal, terdapat 279 perusahaan yang terdaftar di tahun 2011. Jumlah ini meningkat menjadi 289 di tahun 2012 dan 301 di tahun 2013 (Tabel 5.1). Dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar tersebut, tidak semuanya bisa diperoleh laporan tahunan yang bisa digunakan untuk dasar analisis penelitian ini. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa 92,83% perusahaan bisa diperoleh laporan tahunan/laporan berkelanjutan untuk tahun 2011. Persentase yang lebih besar bisa diperoleh pada tahun 2012 (96,89%) dan tahun 2013 (98,34%). Persentase yang tinggi ini mengindikasikan tingginya tingkat validitas eksternal penelitian ini.

**Tabel 5.1: Jumlah perusahaan terdaftar di BEI tahun 2011-2013 beserta yang publikasi Laporan Tahunan/Laporan berkelanjutan**

Tahun	Jumlah perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal	Jumlah Perusahaan yang publikasi annual Report/Laporan Berkelanjutan ke publik	% laporan terhadap yang jumlah perusahaan terdaftar di Pasar Modal
2011	279	259	92,83%
2012	289	280	96,89%
2013	301	296	98,34%

Berdasarkan sektor industri, populasi penelitian ini berasal dari 306 perusahaan dengan persentase paling besar berasal dari sektor basic industri and chemicals atau sektor industri dasar dan kimia (20,5%).

**Tabel 5.2: Jumlah Populasi berdasarkan Sektor industri**

No	Sektor Industri	Frequency	Percent
1	Agriculture	22	7,2
2	Mining	39	12,7
3	Basic Industry and Chemicals	63	20,6
4	Miscellaneous Industry	41	13,4
5	Comsumer Good Industry	37	12,1
6	Property, Real Estate and Building Construction	56	18,3
7	Infrastructure, Utilities & Transportation	48	15,7
	Total	306	100

Untuk keperluan analisis, populasi yang ada dipilih dengan menggunakan kriteria terdaftar di pasar modal pada tahun 2013 dan memiliki laporan tahunan atau laporan berkelanjutan pada tiga tahun berturut-turut. Tabel 5.3 menunjukkan sampel penelitian yang memenuhi kriteria terdapat sebanyak 249 perusahaan dengan porsi terbesar juga berasal dari sektor basic industri and chemicals atau sektor industri dasar dan kimia (21,69%). Dengan adanya sebaran yang representatif, diharapkan penelitian ini memiliki tingkat validitas eksternal yang semakin tinggi.

**Tabel 5.3: Jumlah Sampel berdasarkan Sektor industri**

No	Sektor Industri	Frequency	Percent
1	Agriculture	14	5,62
2	Mining	36	14,46
3	Basic Industry and Chemicals	54	21,69
4	Miscellaneous Industry	35	14,06
5	Comsumer Good Industry	28	11,24
6	Property, Real Estate and Building Construction	47	18,88
7	Infrastructure, Utilities & Transportation	35	14,06
	Total	249	100,00

Berdasarkan kategori emisi perusahaan, kelompok sampel terbanyak adalah perusahaan dengan kategori karbon emisi sedang yaitu sebanyak sebanyak 66,67%, diikuti oleh perusahaan dengan kategori karbon emisi rendah (18,88%) dan karbon emisi tinggi (14,46%).

**Tabel 5.4: Jumlah Sampel berdasarkan Kategori Emisi Perusahaan**

No	Kategori emisi perusahaan	Frequency	Percent
1	Karbon emisi rendah	47	18,88
2	Karbon emisi sedang	166	66,67
3	Karbon emisi tinggi	36	14,46
4	Total	249	100,00

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kepemilikan, dari 249 perusahaan yang dijadikan sampel, sebagian besar adalah perusahaan yang dimiliki swasta (93,57%) dan sisanya (6,43%) dimiliki oleh pemerintah (Tabel 5.5).

**Tabel 5.5: Jumlah Sampel berdasarkan Jenis Kepemilikan**

No	Kategori emisi perusahaan	Frequency	Percent
1	Owned by Private	233	93,57
2	Owned by Government	16	6,43
3	Total	249	100,00

### **B. Pengaruh kebijakan mandatory disclosure**

Tabel 5.6 menunjukkan persentase perusahaan yang mengungkapkan GRI lingkungan selama 2011-2013. Pada tahun 2011 hanya terdapat 13,95% dari total populasi. Angka ini meningkat menjadi 25,25% di tahun 2012 dan 30,90% di tahun 2013. Dalam hal sektor industri, sebelum pengungkapan PP 47/2012, sektor pertambangan memiliki proporsi terbesar (38,49%) dibanding total perusahaan di industri yang diteliti. Akan tetapi, ketika peraturan dikeluarkan, sektor pertanian merupakan sektor dengan proporsi terbesar yang mengungkapkan GRI lingkungan (47.37% di tahun 2012 dan 52.63% di 2013).

## **BAB 6**

### **RENCANA KEGIATAN TAHUN KEDUA DAN KETIGA**

#### **A. Penelitian Tahun Kedua**

Tujuan kedua penelitian untuk menggali alasan patuh dan tidak patuhnya perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan direncanakan akan dicapai pada tahun kedua penelitian. Pada tahap ini terdapat satu pertanyaan penelitian yang akan dijawab yaitu apa yang menyebabkan suatu perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapannya dan apa yang membuat suatu perusahaan tidak mengalami peningkatan?

##### **A1. Subjek penelitian**

Subjek penelitian tahun kedua adalah semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal yang masuk dalam kategori menghasilkan emisi karbon rendah, sedang dan tinggi.

##### **A2. Metode pengumpulan data dan analisis**

Semua perusahaan akan dikirim kuesioner yang menggali faktor-faktor alasan patuh tidaknya dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Kuesioner akan

didesain berdasarkan hasil penelitian data sekunder, penelitian terdahulu, program-program lingkungan yang dikembangkan pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait lingkungan yang masih berlaku. Paralel dengan pengujian data primer, juga dilakukan pengujian menggunakan data sekunder. Beberapa variable yang potensial sebagai penyebab patuh dan tidak patuhnya perusahaan akan diuji. Beberapa variable antara lain, jenis industry, corporate governance, persepsi terhadap kebijakan pemerintah, persepsi terhadap sanksi, komitmen pemegang saham mayoritas, komitmen direksi.

Untuk mendalami jawaban yang diperoleh dari pengujian data kuesioner dan data sekunder, juga dilakukan interview kepada 6 perusahaan yang mewakili tipe respon pengungkapan tanggung jawab lingkungan berbeda. Untuk itu, pada tahun kedua setelah analisis kuesioner selesai, akan disiapkan daftar pertanyaan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian 4. Untuk itu akan disiapkan akses ke perusahaan yang akan diinterview dan setelah itu interview langsung dilaksanakan. Hasil interview selanjutnya ditranskripsi, diolah dan dianalisis untuk melengkapi jawaban terhadap pertanyaan penelitian 4.

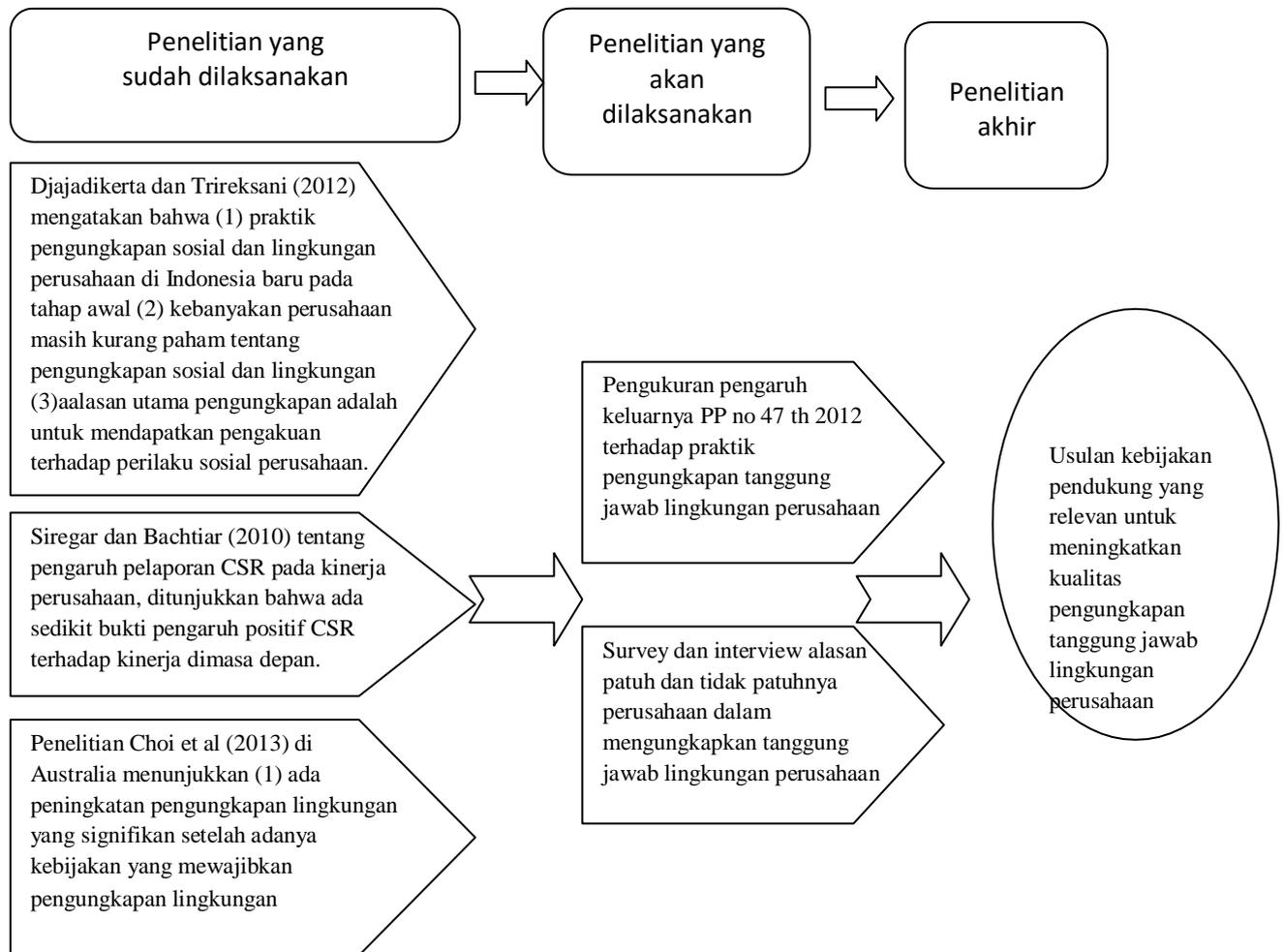
## **B. Penelitian Tahun Ketiga**

Tujuan ketiga penelitian untuk merumuskan kebijakan pendukung yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan direncanakan akan dicapai pada tahun ketiga penelitian. Pada tahap ini terdapat satu pertanyaan penelitian yang akan dijawab yaitu apa kebijakan pendukung yang relevan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Untuk itu pada tahun ketiga akan dilakukan update dan review terhadap kebijakan pemerintah yang masih berlaku terkait pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Kebijakan yang ada akan dihubungkan dengan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari pengujian data sekunder, pengujian kuesioner dan wawancara dengan orang kunci yang membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Review dan analisis yang dilakukan dapat mengidentifikasi potensi pengembangan kebijakan yang relevan mendorong praktik pengungkapan. Hasil identifikasi akan digunakan sebagai dasar merumuskan kebijakan yang relevan untuk diadopsi oleh pemerintah.

Setelah rancangan kebijakan selesai dibuat, selanjutnya akan diadakan focus group discussion dengan key stakeholder untuk mendapat respon terhadap usulan tersebut. Keystakeholder meliputi pemerintah, perusahaan yang tingkat kepatuhan tinggi maupun rendah dan organisasi professional seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan Komite Nasional

Kebijakan Governance. Masukan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merevisi usulan kebijakan yang ditawarkan.

### C. Ringkasan Peta Jalan Penelitian



**Gambar 5.3: Road Map Penelitian**

## BAB 7

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan beberapa sudut pandang yang menarik yang berkaitan dengan kesesuaian terhadap regulasi pemerintah yang baru-baru ini diperkenalkan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Secara formal, PP 47/2012 memberikan jawaban atas harapan para akademisi terhadap tindakan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Akan tetapi, keraguan mengiringi peraturan itu diantaranya (1) tidak adanya sanksi untuk perusahaan yang tidak melaporkan lingkungan sosialnya, dan (2) tidak adanya standar yang mengatur tentang bagaimana melaporkan isu lingkungan sosialnya.

Penelitian ini menunjukkan efek dari PP 47/2012 segera di tahun penerbitannya. Berdasarkan analisis laporan keuangan dari 249 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, adanya peningkatan jumlah di indikator pengukuran (persentase GRI Index yang dilaporkan, jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan masalah lingkungan, persentase karbon emisi yang dilaporkan dan jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan aspek karbon emisi) di tahun kebijakan itu dikeluarkan. Variabel lain (persentase jumlah kata GRI dari total pengungkapan) naik secara signifikan setelah penerbitan kebijakan mandatori. Peraturan yang baru sudah merubah gambaran pengungkapan lingkungan di Indonesia sebagai persentasi dari perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan mengalami peningkatan dari 13,95% (tahun 2011) menjadi 25,25% (tahun 2012) kemudian 30,9% (tahun 2013). Oleh karena itu, penelitian ini mendukung teori legitimasi Suchman (1995) bahwa legitimasi mesti memperhatikan kelompok sosial, yang mana dalam kasus ini regulator dengan peraturan baru, bahwa perusahaan akan mencocokkan harapan baru dengan mengungkapkan banyak informasi agar tetap sesuai. (Suchman, 1995).

Peraturan yang baru telah memacu paling tidak kebutuhan perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan melalui pengungkapan lingkungan. Ini bukti dari hasil penelitian yang mana lingkungan berhubungan dengan pengungkapan ditemukan peningkatan signifikan pada perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan (pertanian, properti, real estate, konstruksi bangunan, infrastruktur, utilities dan transportasi) dalam hal persentase GRI yang tepat setelah peraturan baru di tahun 2012. Ini mengkonfirmasi kebutuhan untuk mengenali fase legitimasi oleh suatu perusahaan seperti yang disusulkan oleh Suchman (1995). Perusahaan yang mempertahankan legitimasi mereka cenderung bertindak sesuai status quo melindungi apa yang terjadi di masa lalu.

Ini akan terlihat di perusahaan dengan karbon emisi yang tinggi contohnya perusahaan mining seperti yang telah di atur sebelumnya dalam hal kewajiban lingkungan dan usaha sebelumnya dalam pelaporan lingkungan. Walaupun demikian, ketika kebijakan pengungkapan mandatory diterbitkan, mereka tidak membuat perubahan yang signifikan. Disamping itu, perusahaan yang menengah dan rendah karbon emisi tidak terlalu mempedulikan pengungkapan lingkungannya, ini membuktikan untuk lebih banyak usaha setelah diterbitkannya kebijakan mandatory, untuk memberikan legitimasi untuk masalah ini. Ini berarti mereka butuh untuk menyediakan panduan detail untuk perusahaan tentang apa yang dilaporkan dengan melihat perbedaan karakteristik masing-masing sektor industri untuk menyediakan kepada publik terkait kecukupan dan informasi yang relevan. Dalam kasus ini apa yang telah terjadi di Spanyol melalui revisi dan pendetailan kebijakan mandatory bisa di tetapkan (Jimenez et al. 2008). Jalan yang lain bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dari peraturan baru ini dengan mengindikasikan secara jelas hukuman untuk yang tidak patuh sehingga memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memperbaiki pengungkapan lingkungan mereka (Chelli et. al. 2014).

## **B. Orisinalitas, batasan dan saran untuk peneliti selanjutnya**

Ini adalah penelitian pertama yang mengkategorikan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan sensitifitas lingkungannya, terkait karbon emisi. Penelitian ini mendukung teori legitimasi dari pengungkapan, yang mana harapan publik kepada perusahaan berubah dengan dikeluarkannya kebijakan mandatory tentang kinerja dan pengungkapan terkait tanggungjawab lingkungan dan perusahaan akan mempertimbangkannya untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk memperoleh legitimasi. Berdasarkan analisis laporan keuangan dari 249 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, ada kenaikan secara signifikan untuk variabel persentase GRI Index yang dilaporkan, jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan masalah lingkungan, persentase karbon emisi yang dilaporkan dan jumlah kata yang digunakan untuk melaporkan aspek karbon emisi. Variabel lain seperti persentase jumlah kata GRI dari total pengungkapan naik secara signifikan setelah penerbitan kebijakan mandatori. Berdasarkan analisis detail, ditemukan peningkatan secara signifikan tidak hanya pada perusahaan dengan karbon emisi yang tinggi, tetapi juga pada perusahaan yang karbon emisinya menengah dan rendah.

Penelitian ini membatasi cakupan yang mana hanya membandingkan pada tahun penerbitan dan satu tahun setelah penerbitan. Di masa depan, periode yang panjang akan mampu melihat konsistensi dari peraturan untuk memastikan praktik yang baik dari perusahaan dalam hal pelaporan lingkungan sebagai respon dari kebijakan mandatory.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakosurtanal (2014), PIPIB untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Karbon, Bakosurtanal, Jakarta, Bakosurtanal, Jakarta.
- BAPPENAS (2012), Satu Tahun Setelah Terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011, BAPPENAS, Jakarta.
- Bansal, P. dan Clelland, I. (2004), "Talking trash: legitimacy, impression management, and unsystematic risk in the context of the natural environment", *Academy of Management Journal*, Vol. 47 No. 1, pp. 93-103.
- Bisnis.com (2012), WAJIB CSR—Presiden Tandatangani PP No.47/2012, diakses pada 24 April 2014, tersedia di: <http://www.nawasis.com/7/post/2012/05/wajib-csrpresidentandatangani-pp-no472012.html>
- Bortree, D.S. dan Waters, R.D. (2008), "Admiring the organization: a study of the relational quality outcomes of the nonprofit organization-volunteer relationship", *Public Relations Journal*, Vol. 2 No. 3,
- Carbon Disclosure Project (CDP) 2012. CDP Nordic 260 Report 2011. URL: <https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Nordic-Report-2011.pdf>. Accessed: Jan 2014
- Choi B, Lee, D. dan Psaros, J. (2013) An analysis of Australian company carbon emission disclosures, *Pacific Accounting Review*, Vol. 25 No. 1, pp. 58-79.
- Dragomir, V. (2010) Environmentally sensitive disclosures and financial performance in a European setting, *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 6 No. 3, 2010 pp. 359-388.
- Deegan, C. (2002), "The legitimising effect of social and environmental disclosures: a theoretical foundation", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 3, pp. 282-311.
- Djajadikerta, H. dan Trireksani, T (2012), 'Corporate social and environmental disclosure by Indonesian listed companies on their corporate web sites', *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 13 No. 1, pp. 21-36
- Global Reporting Initiative (2013). "Maps of Global Industry Classification Standard (GICS) to proposed GRI Business Activity Groups".
- Global Reporting Initiative (2000) Indicator Protocols Set Environment (EN) Version 3.1 2000-2011.
- Gray, R., Kouhy, R. dan Lavers, S. (1995), "Corporate social and environmental reporting", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
- Guthrie, J. dan Parker, L.D. (1989), "Corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory", *Accounting & Business Research*, Vol. 9 No. 76, pp. 343-352.

- Hackston, D. dan Milne, M.J. (1996), "Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 9 No. 1, pp. 77-108.
- Hidayati, N.D. (2011), "Pattern of corporate social responsibility programs: a case study", *Social Responsibility Journal*, Vol. 7 No. 1, pp. 104-17.
- IPCC, (2007), *Climate Change 2007: Mitigation*. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- Jiménez, I. C., Chulián, M. F., Carqués, F. J. H. dan González, C. L. (2008), "Compliance with Mandatory Environmental Reporting in Financial Statements: The Case of Spain (2001-2003)", *Journal of Business Ethics*, Vol. 79, No. 3, pp. 245-262.
- Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (2014), Isu Lingkungan, diakses pada 25 April 2014, tersedia di: <http://www.hp.li.org/isu.php>
- Kamal, M (2012), CSR tidak lagi wajib, diakses pada 25 April 2014, tersedia di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh--miko-kamal--phd>
- Kuo, L. dan Chen, V. (2013), 'Is environmental disclosure an effective strategy on establishment of environmental legitimacy for organization? Management Decision Vol. 51 No. 7, pp. 1462-1487.
- Lako, A (2013), Akuntansi berkelanjutan: tantangan dan strategi pendidikan akuntansi, Makalah pada Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25 September.
- Lindblom, C.K. (1994), "The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure", paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, NY.
- Mathews, M.R. (1993), *Socially Responsible Accounting*, Chapman & Hall, London.
- Meyer, J. W. And Rowan, B., (1991) "Institutionalised organizations: formal structure as myth and ceremony". in W. W. Powell & P. J. DiMaggio (eds.), *The New Institutionalism in Organisational Analysis*, Chichago: University of Chicago Press.
- Mirfazli, E., (2008), "Evaluate corporate social responsibility disclosure at Annual Report Companies in multifarious group of industry members of Jakarta Stock Exchange (JSX), Indonesia", *Social Responsibility Journal*, Vol. 4 No. 3, pp. 388-406.
- Oliver, C. (1991), "Strategic responses to institutional processes", *Academy of Management Review*, Vol. 16 No. 1, pp. 145-179.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Penurunan Emisi Rumah Kaca

Siregar, S. dan Bachtiar, Y (2010) Corporate social reporting: empirical evidence from Indonesia Stock Exchange, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 3, pp. 241-252.

Suchman, M. C. (1995), "Managing legitimacy: strategic and institutional approaches", *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 3, pp. 571-610. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

United Nation (1999) Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations.

Utama, S. (2011), "An evaluation of support infrastructures for corporate responsibility reporting in Indonesia", *Asian Business & Management*, Vol. 10 No. 3, pp. 405–424.

Scott, W.R. (1995), *Institutions and Organizations*, Sage, Thousand Oaks, CA.

Zheng, L., Balsara, N. and Huang, H. (2014), "Regulatory pressure, blockholders and corporate social responsibility (CSR) disclosures in China", *Social Responsibility Journal*, Vol. 10 No. 2, pp. 226-245

Zhu, Q., Geng, Y., Fujita, T. dan Hashimoto, S. (2010), "Green supply chain management in leading manufacturers – case studies in Japanese large companies", *Management Research Review*, Vol. 33 No. 4, pp. 380-392